

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tema RKP 2022 **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dipilih dengan pertimbangan mitigasi Covid-19. Sebagai RKP ketiga dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, RKP 2022 memiliki sepuluh fokus yaitu; Industri. Kedua Pariwisata, Ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, Transformasi Digital, Pembangunan Rendah karbon, Reformasi perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan serta Reformasi Pendidikan.

RKP 2022 juga memuat tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan tujuh Agenda Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, antara lain :

1. Penguatan Ketahanan Ekonomi.
2. Pengembangan Wilayah.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
4. Peningkatan Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Penguatan Infrastruktur.
6. Pembangunan Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim.

7. Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Diharapkan Ketujuh Prioritas Nasional tersebut akan mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang terpadu dan terintegrasi, sesuai dengan tema RKP 2022. Berdasarkan fokus pembangunan RKP 2022, dilakukan penekanan pada empat Prioritas Nasional dan beberapa *Major Project*. Keempat PN itu adalah PN 1 Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, PN 3 SDM berkualitas dan berdaya saing, PN 5 Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, serta PN 6 Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Beberapa *Major Project* juga akan menjadi fokus alokasi pendanaan. *Pertama*, terkait pemulihan industri, pariwisata dan investasi antara lain: pembangunan 10 destinasi pariwisata prioritas, 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 *smelter*, industri 4.0 di lima subsektor prioritas, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, serta jaringan pelabuhan utama terpadu. *Kedua*, terkait penguatan sistem kesehatan nasional, akan ada *Major Project* baru untuk penguatan sistem kesehatan nasional. *Ketiga*, terkait jaring pengaman sosial, akan ada *Major Project* yang akan diprioritaskan, yaitu integrasi bantuan sosial menuju skema perlindungan sosial menyeluruh. *Keempat*, untuk penguatan sistem peringatan bencana, akan diperluas cakupannya sehingga mencakup juga bencana pandemi.

Selain itu Sebagai implementasi dari prinsip *Money Follow Program*, alokasi pagu indikatif pada kementerian/lembaga (K/L) diutamakan untuk pemulihan ekonomi sesuai tema RKP 2022. Berkaitan dengan pemulihan ekonomi ke depan, langkah konkret dalam penyusunan RKP 2022 dimulai dari *Major Projects* yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi: 10 destinasi pariwisata prioritas dengan pendanaan Rp 3,2 triliun; 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 *smelter* dengan pendanaan Rp 0,6 triliun. Di dalam pembangunan kawasan industri dan *smelter* ini belanja pemerintah merupakan fasilitator untuk swasta berperan; industri 4.0 di 5 subsektor prioritas dengan pendanaan Rp 1,3 triliun; pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0 dengan pendanaan Rp 4,3 triliun;

dan jaringan pelabuhan utama terpadu yang pendanaannya oleh BUMN/swasta.

Adapun Target pembangunan 2021 dan 2022 tentu akan terkoreksi. Pertumbuhan Ekonomi pada triwulan pertama, diumumkan BPS, mencapai 2,97 persen dan diharapkan bisa merata pada angka 2,3 persen pada tahun 2020. Selain itu Sasaran pembangunan nasional pada 2021 dan 2022 yang ingin dicapai adalah pulihnya perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19 yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-6 persen serta beberapa target lain seperti tingkat kemiskinan di angka 9,2-9,7 persen, tingkat pengangguran terbuka pada 7,5- 8,2 persen, rasio gini pada 0,377 - 0,379, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 72,78 - 72,90.

Penyusunan RKP Tahun 2022 dilaksanakan juga menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 pasal 4 ayat 1 dalam hal RKP sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (ayat 3) belum ditetapkan penyusunan RKPD Tahun 2022 mengacu pada rancangan akhir RKP yang memuat arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2022.

RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Berkaitan dengan itu,

pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun Perubahan RKPD Tahun 2022, mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2021 berpedoman pada RKPD Tahun 2022 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022, sedangkan Perubahan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2022 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD provinsi Tahun 2022.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.

Krisis Covid-19 memerlukan *Unprecedented Policies* atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi. Dalam *outlook* target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas. Pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2022 akan ditargetkan sebesar 5,4% sampai 6%, dimana Bappenas telah mengkaji ada delapan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 yaitu :

1. Akselerasi Investasi

menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: OL Ciptaker, perluasan positive list investasi, percepatan integrasi OSS, relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja serta melakukan aftercare investasi yang ada agar tidak pindah ke negara lain.

2. Pemulihan Industri dan Perdagangan

Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan: Optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; Akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; Peningkatan fasilitas ekspor; Fasilitas impor bahan baku; Peningkatan standar produk; Optimalisasi PTA/FTA/CEPA untuk perluasan ekspor; Peningkatan efisiensi logistic.

3. Pendalaman Sektor Keuangan

Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan dan stabilitas sektor keuangan.

4. Pembangunan Pariwisata

Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; Peningkatan pemasaran wisata ke originasi (wilayah) yang sudah pulih; Peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; Penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; Peningkatan infrastruktur dan standar layanan; Pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.

5. Penguatan Sektor Kesehatan

Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Germas, kapasitas health security terutama surveilans dan sistem informasi, jejaring dan kapasitas laboratorium serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan.

6. Perluasan Program Perlindungan Sosial

Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informasi.

7. Pengembangan Infrastruktur

Investasi infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan Industri dan Pariwisata.

8. Pembangunan SDM

Program peningkatan SDM; kartu Prakerja, Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Pendidikan Usia Dini.

Seiring dengan proyeksi perekonomian nasional dan global tahun 2022 dalam menghadapi krisis Pandemi Covid 19, tentu hal tersebut akan berdampak pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga hal ini membutuhkan perhatian serius, dengan harapan agar pertumbuhan ekonomi mengalami trend positif. kondisi perekonomian daerah Bolaang Mongondow pada tahun 2022 diprediksi secara bertahap mengalami perbaikan.

Atas dasar itulah APBD Bolaang Mongondow tahun 2022 menjadikan beberapa indikator ekonomi makro sebagai asumsi dalam penyusunannya, yang antara lain mencakup indikator-indikator makro perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow diperkirakan akan meningkat, didukung oleh paket kebijakan ekonomi pemerintah melalui proyek pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor pertanian, perikanan, perdagangan, konstruksi dan industri. Upaya pengendalian inflasi dan optimalisasi pengembangan sektor pariwisata juga akan sangat mempengaruhi meningkatnya perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow. Selain itu, program terkait dipacu dalam rangka meningkatkan pertumbuhan yang berdampak langsung pada peningkatan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

3.2.1. Pertumbuhan PDRB dan Asumsi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan PDRB. Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi dan lain-lain. Berdasarkan pantauan terhadap berbagai faktor baik kondisi ekonomi global maupun nasional serta berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah, pada tahun 2022 target yang harus dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-6 persen dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 3,0 persen 2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5 – 9,0 persen; IPM menjadi 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377 – 0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2 persen; 3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 3,9-5,1 persen, Jawa-Bali 4,8-5,5 persen, Kalimantan 3,6-5,7 persen, Sulawesi 5,4- 7,0 persen, Nusa Tenggara 3,5-5,2 persen, Maluku 5,2-6,2 persen dan Papua 2,6-5,8 persen. **Sementara target pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow tahun 2022 diproyeksi berada pada kisaran 4,9-5% persen walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,80%.** Kondisi perekonomian global yang lebih kuat diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi nasional sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow. Masih berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah diharapkan dapat menjaga pertumbuhan investasi yang sedang dalam trend yang positif. Semakin kondusifnya perekonomian juga diharapkan dapat memulihkan optimisme sektor swasta dan turut berkontribusi positif untuk mendorong investasi.

Tabel. 3.1 Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2017-2021 Kabupaten Bolaang Mongondow

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Pertumbuhan Ekonomi	6,67%	7,50%	7,84%	0.8%	3,87%

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021 dan Perubahan RKPD Kab. Bolaang Mongondow TA. 2022

3.2.2. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi di suatu wilayah menunjukkan besaran-besaran masing-masing kategori lapangan usaha di wilayah tersebut. Struktur ekonomi ini akan memperlihatkan lapangan usaha yang menjadi penggerak ekonomi di wilayah tersebut. Lapangan usaha dengan kontribusi yang besar tentu akan sanggup menggerakkan

keadaan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Lapangan usaha ini juga akan menjadi “idola” perekonomian wilayah tersebut. Pemusatan pengembangan lapangan usaha tersebut tentu akan dengan mudah meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Namun pengambil keputusan tentu tidak boleh terlena dengan hal ini, karena semakin berjalannya waktu serta semakin maju pola perekonomian, beberapa lapangan usaha yang menjadi primadona suatu wilayah suatu saat akan semakin tidak efektif dalam mendorong pertumbuhan. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha yang potensial perlu didorong sehingga nantinya suatu wilayah tidak akan sepenuhnya bergantung hanya pada satu atau dua lapangan usaha, tetapi akan banyak lapangan usaha-lapangan usaha yang dari potensial yang bias menjadi lapangan usaha utama yang nantinya akan menjadi pendorong baru perekonomian di wilayah tersebut.

Di Bolaang Mongondow sendiri kecenderungan seperti ini mulai terlihat. Pada tahun 2020, lapangan usaha yang mendominasi Bolaang Mongondow adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 42,2 persen. Lapangan usaha lain yang juga mendominasi saat itu adalah Lapangan usaha Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Pertambangan dan Penggalan dengan kontribusi masing-masing 11,16 persen, 10,46 persen, dan 9,91 persen. Pada Tahun 2019 sebagian besar Kontribusi lapangan usaha terhadap PDRB menunjukkan tren menurun meskipun tidak signifikan. Terdapat beberapa lapangan usaha yang meningkat yaitu sector Pertambangan dan Penggalan dan Industri Pengolahan. Peningkatan ini didukung dengan adanya perusahaan tambang yang berada di wilayah Bolaang Mongondow. Selain itu Sektor Industri Pengolahan meningkat lebih dari 100%, hal ini terjadi karena peningkatan pada sub sector Industri Galian Bukan Logam karena pada tahun 2020 Pabrik Semen yang ada di Bolaang Mongondow tetap beroperasi secara penuh.